PENERAPAN GREEN ACCOUNTING DALAM PENGELOLAAN LIMBAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BATANG SANGIR

Wahyuni Desti Sonia[1], Tartila Devy[2]

[1,2]*Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi*
E-mail : soniawahyunidesti@gmail.com[1], tartiladevy@uinbukittinggi.ac.id[2]

ABSTRAK

Rumah sakit merupakan institusi pelayanan kesehatan yang berkaitan langsung dengan potensi kerusakan lingkungan akibat aktivitas operasionalnya. Kegiatan medis dan nonmedis yang dilakukan secara terus-menerus menghasilkan berbagai limbah medis dan nonmedis, yang tergolong sebagai limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) dan berpotensi membahayakan lingkungan serta kesehatan masyarakat. penelitian ini bertujuan menganalisis penerapan green accounting dalam pengelolaan limbah pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Batang Sangir, Kabupaten Solok Selatan, sekaligus merumuskan model penerapan yang sesuai dengan konsep tersebut. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan data yang dikumpulkan melalui observasi, wawancara dengan bendahara Dana Alokasi Umum, bendahara Badan Layanan Umum Daerah, serta petugas Kesehatan Lingkungan, dan penelusuran dokumen laporan keuangan tahun 2025. Data biaya lingkungan dianalisis menggunakan klasifikasi Hansen dan Mowen yang membagi biaya menjadi biaya pencegahan, deteksi, kegagalan internal, dan kegagalan eksternal. Hasil penelitian menemukan 15 komponen biaya lingkungan dengan total nilai Rp146.386.791 pada tahun 2025, terdiri atas biaya pencegahan (71,87%), biaya kegagalan internal (18,43%), dan biaya deteksi (9,70%), sementara biaya kegagalan eksternal tidak ditemukan. Dari aspek pengukuran, pencatatan biaya telah sesuai dengan konsep green accounting karena menggunakan nilai historis. Namun dari aspek pengakuan, penyajian, dan pengungkapan, penerapannya belum sesuai karena biaya lingkungan masih melebur dalam akun Beban Barang dan Jasa dan belum diungkapkan secara naratif dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Penelitian ini merumuskan model penerapan green accounting yang sesuai melalui empat tahapan, yaitu identifikasi biaya lingkungan secara menyeluruh, klasifikasi berdasarkan kategori Hansen dan Mowen, pengakuan melalui akun "Beban Lingkungan" berbasis akrual, serta penyajian dan pengungkapan yang terpisah dan transparan. Rendahnya kesesuaian penerapan tersebut tidak mencerminkan rendahnya komitmen lingkungan rumah sakit, melainkan disebabkan oleh keterbatasan sistem akuntansi yang tersedia untuk mengidentifikasi dan melaporkan biaya lingkungan secara memadai.

Kata Kunci : *Green Accounting, Biaya Lingkungan, Pengelolaan Limbah, Rumah Sakit, Akuntabilitas*

ABSTRACT

Hospitals are healthcare institutions directly associated with potential environmental damage resulting from their operational activities. Continuous medical and non-medical activities generate various types of medical and non-medical waste—classified as hazardous and toxic waste (B3)—that pose potential risks to the environment and public health. this study aims to analyze the implementation of green accounting in waste management at the Batang Sangir Regional General Hospital, South Solok Regency, and to formulate an implementation model consistent with that concept. A descriptive qualitative approach was employed, with data collected through observation, interviews with the General Allocation Fund treasurer, the Regional Public Service Agency treasurer, and the Environmental Health officer, as well as a review of the 2025 financial statement documents. Environmental cost data were analyzed using the Hansen and Mowen classification, which groups costs into prevention, detection, internal failure, and external failure costs. The findings identify 15 environmental cost components totaling Rp146,386,791 in 2025, consisting of prevention costs (71.87%), internal failure costs (18.43%), and detection costs (9.70%), while external failure costs were not found. In terms of measurement, the recording of costs already complies with the green accounting concept because it applies historical cost values. However, in terms of recognition, presentation, and disclosure, implementation is not yet appropriate because environmental costs remain merged within the Goods and Services Expense account and are not narratively disclosed in the Notes to the Financial Statements. This study formulates a suitable green accounting implementation model through four stages: comprehensive identification of environmental costs, classification based on the Hansen and Mowen categories, accrual-based recognition through a dedicated "Environmental Expense" account, and separate, transparent presentation and disclosure. The low level of compliance does not reflect a weak environmental commitment on the part of the hospital, but rather stems from limitations in the accounting system currently available to identify and report environmental costs adequately.

Keywords : *Green Accounting, Environmental Cost, Waste Management, Hospital, Accountability*

PENDAHULUAN

Green accounting merupakan perluasan dari akuntansi konvensional yang mengintegrasikan dimensi lingkungan ke dalam seluruh siklus akuntansi, mulai dari pengakuan, pengukuran, pencatatan, penyajian, hingga pengungkapan. Berbeda dengan akuntansi keuangan yang hanya berfokus pada pencatatan transaksi ekonomi, *green accounting* memberi ruang bagi biaya dan dampak lingkungan agar informasi yang dihasilkan lebih komprehensif, transparan, dan akuntabel bagi para penggunanya (Almunawwaroh et al., 2022; Lako, 2018).

Urgensi penerapan *green accounting* semakin nyata pada entitas yang aktivitas operasionalnya menghasilkan limbah, termasuk rumah sakit. Sebagai institusi pelayanan kesehatan, rumah sakit menghasilkan limbah medis maupun nonmedis yang sebagian tergolong limbah bahan berbahaya dan beracun (B3), sehingga pengelolaannya diatur secara ketat melalui Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 18 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Limbah Medis Fasilitas Pelayanan Kesehatan Berbasis Wilayah dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.56/Menlhk-Setjen/2015. Kewajiban tersebut tidak hanya menyangkut aspek teknis pengolahan limbah, tetapi juga menuntut pencatatan biaya lingkungan yang transparan sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.

Sejumlah kajian terdahulu memperlihatkan pola yang relatif konsisten pada berbagai rumah sakit. Rospani dan Handajani (2024) yang menganalisis penerapan *green accounting* pada RSUD Kota Mataram menemukan bahwa biaya lingkungan telah dikeluarkan rumah sakit, namun belum disajikan sebagai pos tersendiri dalam laporan keuangan. Jauhari (2024) dalam kajiannya terhadap penerapan green accounting pada pengelolaan limbah turut menegaskan bahwa persoalan utama bukan pada ketiadaan aktivitas pengelolaan lingkungan, melainkan pada lemahnya sistem pencatatan biaya lingkungan itu sendiri. Temuan serupa dikemukakan oleh Rohim dan Hardiningsih (2022) pada RSUD R.A. Kartini Jepara, yang mengungkapkan bahwa biaya lingkungan masih tergabung dalam beban operasional umum sehingga sulit ditelusuri secara spesifik. Ketiga kajian tersebut secara konsisten menunjukkan bahwa meskipun rumah sakit secara operasional telah mengelola limbahnya, pencatatan akuntansi atas biaya lingkungan pada umumnya belum terpisah dari beban operasional secara umum.

Studi-studi tersebut sebagian besar dilakukan pada rumah sakit yang telah beroperasi dalam jangka waktu relatif lama, sementara kajian pada rumah sakit milik pemerintah daerah berstatus Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) yang baru berkembang masih terbatas. RSUD Batang Sangir Kabupaten Solok Selatan merupakan rumah sakit milik Pemerintah Kabupaten Solok Selatan yang pelayanan rawat inapnya baru aktif beroperasi sejak Agustus 2023, sehingga peningkatan volume limbah medis maupun nonmedis berlangsung relatif cepat, sementara sistem pencatatan biaya lingkungan belum sepenuhnya menyesuaikan diri dengan perkembangan tersebut. Kesenjangan penelitian (research gap) inilah yang mendasari perlunya kajian lanjutan pada entitas rumah sakit dengan karakteristik kelembagaan yang berbeda dari penelitian-penelitian sebelumnya.

Berdasarkan hasil observasi awal, biaya-biaya yang berkaitan dengan pengelolaan lingkungan di RSUD Batang Sangir masih tergabung dalam akun Beban Barang dan Jasa sehingga sulit ditelusuri secara spesifik sebagai biaya lingkungan. Kondisi ini berpotensi menimbulkan rendahnya transparansi, sulitnya evaluasi efektivitas pengelolaan limbah, serta lemahnya dasar pengambilan keputusan terkait alokasi anggaran lingkungan pada periode berikutnya. Bertolak

dari permasalahan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk (1) menganalisis apakah RSUD Batang Sangir telah menerapkan konsep green accounting dalam pengelolaan limbah, dan (2) merumuskan model penerapan green accounting yang sesuai bagi RSUD Batang Sangir berdasarkan pendekatan klasifikasi biaya lingkungan Hansen dan Mowen (2009).

Kajian Pustaka

Teori legitimasi memandang organisasi sebagai bagian dari sistem sosial yang harus menjalankan aktivitasnya sesuai dengan nilai dan norma masyarakat agar memperoleh penerimaan sosial secara berkelanjutan (Guthrie, 2006; S.A. & Popa, 2013). Dalam kerangka ini, entitas dituntut untuk tidak hanya berorientasi pada kinerja ekonomi, tetapi juga bertanggung jawab atas dampak lingkungan yang ditimbulkan dari aktivitas operasionalnya. Green accounting menjadi instrumen konkret yang memungkinkan entitas menunjukkan bahwa aktivitasnya telah sejalan dengan tuntutan legitimasi tersebut, salah satunya melalui pengungkapan biaya lingkungan secara transparan dan sistematis.

Sejalan dengan hal tersebut, teori stakeholder menegaskan bahwa keberlangsungan suatu entitas sangat dipengaruhi oleh dukungan para pemangku kepentingan, sehingga entitas perlu mengakomodasi kebutuhan informasi mereka, termasuk informasi lingkungan (Karina & Yuyetta, 2013). Bagi rumah sakit, pemangku kepentingan tersebut mencakup pemerintah daerah selaku pemilik, masyarakat pengguna layanan, maupun pihak ketiga pengelola limbah. Pengungkapan biaya lingkungan menjadi salah satu bentuk akuntabilitas rumah sakit kepada seluruh pemangku kepentingan tersebut, sekaligus memperkuat kepercayaan publik terhadap pengelolaan lingkungan yang dilakukan.

Kedua perspektif tersebut berkaitan erat dengan gagasan keberlanjutan (sustainability) yang menuntut keseimbangan antara kepentingan ekonomi dan kelestarian lingkungan (Tjahjadi et al., 2025). *Green accounting* merupakan wujud internalisasi prinsip keberlanjutan tersebut ke dalam sistem akuntansi, karena memungkinkan entitas mengidentifikasi, mengalokasikan, dan mengevaluasi biaya serta dampak lingkungan yang timbul dari aktivitas operasionalnya, sekaligus mendukung pengambilan keputusan yang tidak semata berorientasi pada efisiensi ekonomi.

Green accounting atau akuntansi lingkungan didefinisikan sebagai proses pengakuan, pengukuran, pencatatan, pelaporan, dan pengungkapan secara terintegrasi atas transaksi keuangan, sosial, dan lingkungan, agar dihasilkan informasi yang utuh, terpadu, dan bermanfaat bagi pengambilan keputusan (Lako, 2018). Schaltegger dan Burritt (2020) menekankan bahwa akuntansi lingkungan berfungsi mengidentifikasi, mengukur, dan mengomunikasikan biaya lingkungan agar entitas dapat mengendalikan dampak ekologis dari aktivitasnya secara lebih efisien. Dalam perspektif keislaman, penerapan akuntansi lingkungan juga sejalan dengan prinsip menjaga kelestarian alam sebagai bagian dari tanggung jawab manusia terhadap lingkungan, sebagaimana ditegaskan oleh Abdullah (2022) dan Syamsuri dan Mus (2020), yang memandang pengelolaan lingkungan sebagai wujud aktualisasi ajaran Islam dalam praktik akuntansi.

Salah satu kerangka yang banyak digunakan untuk mengelompokkan biaya lingkungan adalah klasifikasi Hansen dan Mowen (2009), yang membagi biaya lingkungan menjadi empat kategori. Pertama, biaya pencegahan (prevention costs), yaitu biaya yang dikeluarkan untuk mencegah timbulnya kerusakan lingkungan sebelum terjadi. Kedua, biaya deteksi (detection costs), yaitu biaya yang dikeluarkan untuk memastikan aktivitas organisasi telah sesuai dengan standar dan regulasi lingkungan yang berlaku. Ketiga, biaya kegagalan internal (internal failure

costs), yaitu biaya untuk menangani dan mengolah limbah yang telah dihasilkan agar tidak dilepas ke lingkungan dalam kondisi berbahaya. Keempat, biaya kegagalan eksternal (external failure costs), yaitu biaya yang timbul setelah limbah terlanjur dilepas ke lingkungan, misalnya denda, klaim, atau kompensasi atas pencemaran yang terjadi.

Penelitian terdahulu pada berbagai rumah sakit menunjukkan pola yang relatif konsisten terkait penerapan konsep tersebut. Rospani dan Handajani (2024) pada RSUD Kota Mataram, Jauhari (2024) dalam kajiannya terhadap penerapan green accounting dalam pengelolaan limbah, serta Rohim dan Hardiningsih (2022) pada RSUD R.A. Kartini Jepara sama-sama menemukan bahwa biaya lingkungan pada umumnya belum diungkapkan secara terpisah dalam laporan keuangan rumah sakit, meskipun aktivitas pengelolaan lingkungan telah dilaksanakan secara operasional. Pada konteks di luar sektor kesehatan, Rizal dkk. (2025) dan Oktraviasni dkk. (2024) turut menegaskan bahwa keberhasilan penerapan akuntansi lingkungan sangat bergantung pada ketersediaan struktur akun khusus dan komitmen manajemen dalam mengelola informasi biaya lingkungan. Temuan-temuan ini memperkuat perlunya kajian lanjutan pada entitas rumah sakit dengan karakteristik kelembagaan berbeda, khususnya rumah sakit milik pemerintah daerah berstatus BLUD yang relatif baru berkembang, sebagaimana dikaji dalam penelitian ini.

Berdasarkan kajian teoritis dan empiris tersebut, penelitian ini memosisikan RSUD Batang Sangir sebagai objek yang relevan untuk dikaji lebih lanjut, mengingat rumah sakit ini merupakan entitas BLUD milik pemerintah daerah dengan aktivitas pelayanan yang baru berkembang, sehingga kesesuaian penerapan green accounting-nya perlu dianalisis secara empiris menggunakan pendekatan klasifikasi biaya lingkungan Hansen dan Mowen.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, yaitu penelitian yang berorientasi pada fenomena alami di lapangan dan menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis maupun lisan dari subjek yang diamati (Abdussamad, 2021). Pendekatan ini dipilih karena penelitian bertujuan menggambarkan secara mendalam kondisi penerapan green accounting di RSUD Batang Sangir berdasarkan data lapangan, bukan menguji hipotesis secara statistik.

Penelitian dilaksanakan di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Batang Sangir yang berlokasi di Kabupaten Solok Selatan, dengan pertimbangan bahwa rumah sakit ini merupakan institusi pelayanan kesehatan milik pemerintah daerah yang aktivitas operasionalnya menghasilkan limbah medis dan nonmedis sehingga memerlukan pengelolaan lingkungan yang baik serta pencatatan biaya yang tepat. Pengumpulan data dilaksanakan mulai 9 Februari 2026 hingga penelitian dinyatakan selesai.

Jenis data yang digunakan terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh langsung dari objek penelitian melalui wawancara dengan informan terkait (Wirartha, 2006), sedangkan data sekunder bersumber dari dokumen pendukung berupa rincian biaya pengelolaan limbah yang tercatat dalam laporan keuangan RSUD Batang Sangir tahun 2025, meliputi Laporan Operasional, Laporan Realisasi Anggaran, dan Neraca.

Informan penelitian ditentukan menggunakan teknik purposive sampling, yaitu memilih informan yang informatif berdasarkan kesesuaian dan kecukupan informasi yang dibutuhkan (Heryana, 2018). Informan dalam penelitian ini terdiri atas Bendahara Dana Alokasi Umum (DAU), Bendahara Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) RSUD Batang Sangir, dan petugas bagian Kesehatan Lingkungan (Kesling) rumah sakit.

Data dikumpulkan melalui tiga teknik, yaitu observasi nonpartisipan terhadap aktivitas pengelolaan limbah dan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL), wawancara semiterstruktur dengan informan untuk memperoleh penjelasan yang lebih terbuka (Kriyantono, 2006; Alhamid & Anufa, 2019), serta dokumentasi berupa penelusuran rincian belanja dan laporan keuangan rumah sakit tahun 2025.

Data dianalisis menggunakan teknik reduksi data, penyajian data, dan penarikan/verifikasi kesimpulan (Abdussamad, 2021). Data biaya yang berkaitan dengan pengelolaan lingkungan direduksi dan difokuskan pada komponen biaya lingkungan, kemudian diklasifikasikan menggunakan kerangka Hansen dan Mowen (2009), sebelum akhirnya dianalisis kesesuaiannya dengan konsep green accounting pada aspek pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan, untuk selanjutnya dirumuskan model penerapan yang sesuai.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Objek Penelitian

RSUD Batang Sangir merupakan rumah sakit milik Pemerintah Kabupaten Solok Selatan yang dibangun sejak tahun 2020 melalui pendanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kementerian Kesehatan Republik Indonesia dan mulai beroperasi pada tahun 2022, dengan pelayanan rawat inap yang baru aktif sejak Agustus 2023. Sejak beroperasinya layanan rawat inap tersebut, aktivitas pelayanan meningkat secara signifikan sehingga volume limbah medis dan nonmedis yang dihasilkan juga meningkat. Dalam operasionalnya, rumah sakit telah memiliki Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) untuk mengelola limbah cair, serta menjalin kerja sama dengan pihak ketiga berizin untuk pengangkutan dan pengolahan limbah medis. Namun demikian, hasil observasi dan analisis laporan keuangan tahun 2025 menunjukkan bahwa biaya-biaya yang berkaitan dengan aktivitas tersebut masih digabungkan ke dalam akun Beban Barang dan Jasa yang bersifat umum, sehingga belum tersaji sebagai biaya lingkungan tersendiri.

Identifikasi Biaya Lingkungan

Berdasarkan hasil observasi, wawancara, dan penelusuran dokumen internal bagian Kesehatan Lingkungan serta laporan keuangan RSUD Batang Sangir tahun 2025, teridentifikasi 15 komponen biaya yang berkaitan langsung dengan aktivitas pengelolaan lingkungan rumah sakit, sebagaimana disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1. Identifikasi Biaya Lingkungan RSUD Batang Sangir Tahun 2025

No	Uraian Biaya	Nilai (Rp)
1	Bahan kimia pengolahan air limbah (IPAL)	80.000.000
2	Bahan-bahan lainnya untuk operasional IPAL	14.137.000
3	Upah penyemprotan (perawatan area IPAL)	750.000
4	Upah perbaikan air PAM Sinar	200.000
5	Upah pemotongan rumput area IPAL	250.000
6	Upah perangkaian dan pemasangan pipa kolam IPAL	375.000
7	Pelatihan penanggung jawab dan operator limbah air, udara, dan B3	8.500.000

8	Perawatan pompa dan filter mesin IPAL	1.000.000
9	Jasa tenaga laboratorium (pemeriksaan kualitas air limbah IPAL)	5.766.200
10	Pemeriksaan sampel bulanan inlet dan outlet IPAL	2.764.800
11	Pemeriksaan sampel calon badan air	460.800
12	Bahan pembuatan kolam ikan indikator kualitas air limbah	1.763.000
13	Upah tukang pembuatan kolam ikan indikator	3.000.000
14	Biaya pengantaran sampel uji laboratorium	450.000
15	Jasa pengolahan sampah/limbah medis	26.969.991
	Jumlah	**146.386.791**

Sumber: Data internal Kesehatan Lingkungan dan laporan keuangan RSUD Batang Sangir, 2025 (diolah).

Berdasarkan Tabel 1, total biaya lingkungan yang berhasil diidentifikasi mencapai Rp146.386.791 selama tahun 2025. Dua komponen terbesar berasal dari pengadaan bahan kimia IPAL sebesar Rp80.000.000 dan jasa pengolahan sampah/limbah medis sebesar Rp26.969.991. Hasil rekonsiliasi dengan dokumen resmi menunjukkan bahwa dari 15 komponen tersebut, hanya dua komponen yang dapat ditelusuri langsung kesesuaiannya pada Laporan Operasional dan Laporan Realisasi Anggaran, yaitu jasa pengolahan sampah/limbah medis (Rp26.969.991, terealisasi 44,94% dari anggaran Rp60.000.000) dan jasa tenaga laboratorium (Rp5.766.200, terealisasi 57,66% dari anggaran Rp10.000.000), sedangkan 13 komponen lainnya masih melebur ke dalam akun umum seperti Belanja Bahan Kimia, Belanja Kursus/Pelatihan, dan Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin, sehingga hanya dapat ditelusuri melalui dokumen pendukung internal bagian Kesling. Pada Neraca RSUD Batang Sangir tahun 2025 juga tidak ditemukan pos akun yang secara khusus mencerminkan aset maupun biaya lingkungan, karena sarana seperti IPAL masih melebur ke dalam pos Peralatan dan Mesin serta Gedung dan Bangunan secara umum. Kondisi ini menegaskan bahwa persoalan utama bukan terletak pada ketiadaan aktivitas pengelolaan lingkungan, melainkan pada belum tersedianya struktur akun yang mampu memisahkan biaya lingkungan dari beban operasional secara umum.

Klasifikasi Biaya Lingkungan Berdasarkan Hansen dan Mowen

Seluruh komponen biaya lingkungan pada Tabel 1 selanjutnya dikelompokkan ke dalam empat kategori biaya lingkungan menurut Hansen dan Mowen (2009), sebagaimana disajikan pada Tabel 2.

Tabel 2. Klasifikasi Biaya Lingkungan RSUD Batang Sangir Berdasarkan Teori Hansen dan Mowen

Kategori Biaya	Nilai (Rp)	Persentase (%)
Biaya Pencegahan (Prevention Costs)	105.212.000	71,87
Biaya Deteksi (Detection Costs)	14.204.800	9,70

Biaya Kegagalan Internal (Internal Failure Costs)	26.969.991	18,43
Biaya Kegagalan Eksternal (External Failure Costs)	0	0,00
Jumlah	**146.386.791**	**100,00**

Sumber: Hasil pengolahan data penelitian, 2025.

Biaya pencegahan mendominasi total biaya lingkungan dengan nilai Rp105.212.000 atau sekitar 71,87%, diikuti biaya kegagalan internal sebesar Rp26.969.991 (18,43%), dan biaya deteksi sebesar Rp14.204.800 (9,70%), sedangkan biaya kegagalan eksternal tidak ditemukan karena tidak terdapat denda, klaim, maupun kompensasi pencemaran lingkungan kepada pihak luar selama periode penelitian. Dominasi biaya pencegahan menunjukkan bahwa RSUD Batang Sangir secara substansi telah berupaya menekan risiko pencemaran lingkungan sejak awal melalui pengadaan bahan dan pemeliharaan sarana pengolahan limbah, bukan semata-mata menangani limbah setelah dihasilkan. Meskipun demikian, ketiadaan biaya kegagalan eksternal tidak dapat serta-merta dimaknai sebagai bukti pengelolaan lingkungan yang telah sepenuhnya optimal, mengingat sistem pencatatan yang ada belum memungkinkan penelusuran menyeluruh atas seluruh potensi dampak lingkungan yang mungkin timbul.

Kesesuaian Penerapan Green Accounting

Analisis kesesuaian dilakukan pada empat aspek utama green accounting, yaitu pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan. Dari aspek pengakuan, RSUD Batang Sangir telah mengeluarkan berbagai biaya lingkungan sebagaimana diuraikan pada Tabel 1, namun biaya-biaya tersebut belum memiliki akun khusus dan masih dicatat berdasarkan kode rekening yang berlaku umum, seperti akun Beban Barang dan Jasa, sehingga pengakuan biaya lingkungan belum sesuai dengan konsep green accounting meskipun secara substansi telah diakui sebagai beban operasional.

Dari aspek pengukuran, seluruh biaya lingkungan telah dicatat berdasarkan nilai rupiah aktual sesuai bukti transaksi, baik berupa kuitansi maupun faktur, sehingga dari sisi ini RSUD Batang Sangir telah sesuai dengan konsep green accounting karena konsisten menggunakan prinsip biaya historis (historical cost) sebagaimana berlaku dalam standar akuntansi pemerintahan.

Dari aspek penyajian, biaya lingkungan masih tersebar pada beberapa kode rekening tanpa sub-pos khusus yang menghimpun seluruh biaya lingkungan, sehingga total biaya lingkungan sebesar Rp146.386.791 tidak dapat diketahui secara langsung hanya dengan membaca Laporan Operasional. Dari aspek pengungkapan, RSUD Batang Sangir belum mengungkapkan biaya lingkungan secara khusus dalam laporan keuangannya; informasi tersebut hanya dapat diperoleh melalui penelusuran rincian belanja, dokumen internal, dan wawancara dengan pihak terkait, sehingga tidak tersedia bagi pengguna laporan keuangan secara umum. Dengan demikian, dari empat aspek yang dianalisis, hanya aspek pengukuran yang telah sesuai dengan konsep green accounting, sementara pengakuan, penyajian, dan pengungkapan masih memerlukan perbaikan mendasar.

Temuan tersebut juga diperkuat oleh keterangan informan bahwa lemahnya pencatatan biaya lingkungan turut disebabkan oleh belum terintegrasinya mekanisme pengajuan dan pertanggungjawaban biaya operasional lingkungan ke dalam Buku Kas Umum (BKU) Ganti Uang (GU) secara tepat waktu. Petugas Kesehatan Lingkungan kerap mencatat kebutuhan biaya secara manual dan mengajukannya kepada bagian Keuangan, namun sebagian pengajuan bersifat

insidental sehingga tidak seluruhnya terekam dalam BKU GU pada periode yang sama dengan waktu pengeluaran riilnya. Kondisi ini bahkan mendorong petugas Kesling menggunakan dana pribadi terlebih dahulu untuk membiayai kebutuhan mendesak sebelum diganti oleh pihak rumah sakit, sehingga menimbulkan selisih waktu pencatatan antara realisasi kegiatan di lapangan dengan pencatatan resmi pada laporan keuangan.

Model Usulan Penerapan Green Accounting

Berdasarkan hasil analisis kesesuaian di atas, penelitian ini merumuskan model penerapan green accounting yang sesuai bagi RSUD Batang Sangir melalui empat tahapan yang saling berkaitan, yaitu identifikasi, klasifikasi, pengakuan, serta penyajian dan pengungkapan.

Tahap identifikasi dilakukan dengan menghimpun seluruh biaya yang berkaitan dengan aktivitas pengelolaan lingkungan secara rutin setiap periode akuntansi, sebagaimana dicontohkan pada Tabel 1, sehingga dapat dijadikan titik awal (baseline) bagi pencatatan biaya lingkungan pada periode-periode berikutnya. Tahap klasifikasi dilakukan dengan mengelompokkan biaya yang telah diidentifikasi ke dalam empat kategori Hansen dan Mowen sebagaimana dicontohkan pada Tabel 2. Tahap pengakuan dilakukan dengan mencatat biaya lingkungan melalui akun "Beban Lingkungan" tersendiri berbasis akrual, terpisah dari akun Beban Barang dan Jasa yang bersifat umum, sebagaimana diilustrasikan pada contoh jurnal umum berikut.

Tabel 3. Usulan Jurnal Umum Pencatatan Biaya Lingkungan RSUD Batang Sangir

Tanggal	Keterangan	Debit (Rp)	Kredit (Rp)
31/12/2025	Beban Lingkungan – Biaya Pencegahan	105.212.000	
	Kas/Utang Belanja		105.212.000
31/12/2025	Beban Lingkungan – Biaya Deteksi	14.204.800	
	Kas/Utang Belanja		14.204.800
31/12/2025	Beban Lingkungan – Biaya Kegagalan Internal	26.969.991	
	Kas/Utang Belanja		26.969.991

Sumber: Hasil olahan peneliti berdasarkan klasifikasi Tabel 2, 2025. Jurnal ini merupakan usulan konseptual yang perlu disesuaikan dengan kebijakan akuntansi dan bagan akun standar BLUD RSUD Batang Sangir.

Biaya lingkungan yang telah diakui melalui akun tersendiri selanjutnya disajikan sebagai sub-pos khusus dalam Laporan Operasional, di bawah kelompok Beban Operasi, terpisah dari Beban Barang dan Jasa yang bersifat umum. Penyajian secara terpisah ini memungkinkan pengguna laporan keuangan, termasuk manajemen rumah sakit, Pemerintah Kabupaten Solok Selatan, maupun masyarakat, untuk mengetahui secara langsung besarnya komitmen finansial rumah sakit terhadap pengelolaan lingkungan tanpa harus menelusuri rincian belanja satu per satu.

Selain disajikan dalam Laporan Operasional, informasi biaya lingkungan sebaiknya diungkapkan secara naratif dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK), yang mencakup sekurang-kurangnya kebijakan akuntansi yang digunakan dalam pengakuan biaya lingkungan, rincian nilai biaya lingkungan berdasarkan klasifikasi Hansen dan Mowen, penjelasan mengenai aktivitas pengelolaan lingkungan yang mendasari timbulnya biaya tersebut, dan perbandingan nilai biaya lingkungan dengan periode sebelumnya apabila data historis tersedia. Sebagai ilustrasi

konkret dari usulan penyajian dan pengungkapan tersebut, Tabel 4 menyajikan contoh Laporan Biaya Lingkungan RSUD Batang Sangir tahun 2025 yang dapat disajikan sebagai lampiran tersendiri pada CaLK.

Tabel 4. Usulan Laporan Biaya Lingkungan RSUD Batang Sangir Tahun 2025

Kategori Biaya Lingkungan	Nilai (Rp)	Persentase (%)
Biaya Pencegahan (Prevention Costs)	105.212.000	71,87
Biaya Deteksi (Detection Costs)	14.204.800	9,70
Biaya Kegagalan Internal (Internal Failure Costs)	26.969.991	18,43
Biaya Kegagalan Eksternal (External Failure Costs)	0	0,00
Jumlah Biaya Lingkungan	**146.386.791**	**100,00**

Sumber: Hasil olahan peneliti berdasarkan Tabel 1 dan Tabel 2, 2025.

Laporan biaya lingkungan sebagaimana disajikan pada Tabel 4 memberikan gambaran yang lebih informatif dibandingkan penyajian biaya lingkungan yang tergabung dalam akun Beban Barang dan Jasa sebagaimana praktik yang berlaku saat ini. Melalui laporan ini, dapat diketahui secara langsung bahwa RSUD Batang Sangir mengalokasikan sebagian besar biaya lingkungannya (71,87%) untuk aktivitas pencegahan, yang mencerminkan orientasi pengelolaan lingkungan yang bersifat proaktif. Penerapan model usulan ini pada dasarnya tidak memerlukan perubahan besar pada sistem akuntansi yang telah berjalan, melainkan cukup dengan penambahan struktur akun khusus pada bagan akun standar yang telah ada, disertai mekanisme identifikasi dan klasifikasi biaya lingkungan yang dilakukan secara rutin setiap periode.

Evaluasi Menyeluruh dan Pembahasan

Secara menyeluruh, dari lima aspek yang dievaluasi identifikasi, klasifikasi, pengakuan, penyajian, dan pengungkapan hanya aspek pengukuran yang telah sesuai dengan konsep green accounting, sedangkan aspek lainnya masih memerlukan perbaikan mendasar, khususnya pada sisi kelembagaan akuntansi berupa penambahan struktur akun dan pada sisi pelaporan berupa penyajian serta pengungkapan yang terpisah dan transparan. Hasil ini konsisten dengan temuan Rospani dan Handajani (2024) pada RSUD Kota Mataram serta Rohim dan Hardiningsih (2022) pada RSUD R.A. Kartini Jepara, yang sama-sama menunjukkan bahwa aspek pengukuran cenderung lebih mudah dipenuhi dibandingkan aspek pengakuan, penyajian, dan pengungkapan, karena entitas pada umumnya telah terbiasa mencatat biaya berdasarkan bukti transaksi, namun belum memiliki struktur akun khusus untuk memisahkan biaya lingkungan dari beban operasional umum.

Meskipun demikian, temuan ini perlu dimaknai secara proporsional. Rendahnya tingkat kesesuaian pada aspek pencatatan akuntansi tidak sejalan dengan rendahnya komitmen operasional rumah sakit terhadap pengelolaan lingkungan. RSUD Batang Sangir telah mengeluarkan biaya lingkungan yang cukup signifikan, yaitu Rp146.386.791 pada tahun 2025, dengan proporsi terbesar (71,87%) dialokasikan untuk biaya pencegahan. Dengan kata lain, kesenjangan yang terjadi bukan disebabkan oleh ketiadaan aktivitas pengelolaan lingkungan, melainkan oleh belum tersedianya sistem akuntansi yang mampu merekam, mengelompokkan, dan melaporkan aktivitas

tersebut secara memadai. Temuan ini sejalan dengan perspektif teori legitimasi dan teori stakeholder yang telah diuraikan pada bagian kajian pustaka, bahwa komitmen lingkungan suatu entitas tidak selalu tercermin secara langsung dalam sistem pelaporan keuangannya apabila struktur akuntansi pendukung belum tersedia.

Dengan mengacu pada model usulan yang telah dirumuskan, RSUD Batang Sangir memiliki peluang yang cukup terbuka untuk meningkatkan kesesuaian penerapan green accounting-nya, mengingat perubahan yang diperlukan bersifat administratif, yaitu penambahan struktur akun dan format pelaporan, dan tidak memerlukan perubahan besar pada praktik pengelolaan lingkungan yang sudah berjalan. Penerapan model ini juga akan memberikan sejumlah manfaat, antara lain meningkatkan transparansi dan akuntabilitas rumah sakit dalam pengelolaan lingkungan sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, memudahkan manajemen dalam mengevaluasi efektivitas dan efisiensi biaya pengelolaan limbah dari waktu ke waktu, menyediakan data pendukung yang lebih kuat dalam proses akreditasi rumah sakit, serta memperkuat dasar pengambilan keputusan terkait perencanaan anggaran lingkungan pada periode-periode berikutnya.

KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa biaya lingkungan yang teridentifikasi di RSUD Batang Sangir selama tahun 2025 berjumlah 15 komponen biaya dengan total nilai Rp146.386.791, yang terdiri atas biaya pencegahan sebesar 71,87%, biaya kegagalan internal sebesar 18,43%, dan biaya deteksi sebesar 9,70%, sedangkan biaya kegagalan eksternal tidak ditemukan karena tidak terdapat denda, klaim, maupun kompensasi pencemaran lingkungan kepada pihak luar selama periode penelitian. Penerapan akuntansi atas biaya lingkungan di RSUD Batang Sangir secara keseluruhan belum sepenuhnya sesuai dengan konsep green accounting; hanya aspek pengukuran yang telah sesuai karena biaya lingkungan dicatat berdasarkan nilai historis, sedangkan aspek pengakuan, penyajian, dan pengungkapan belum sesuai karena biaya lingkungan belum memiliki akun khusus dan belum diungkapkan secara naratif dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Penerapan green accounting yang sesuai bagi RSUD Batang Sangir dapat diwujudkan melalui empat tahapan, yaitu identifikasi biaya lingkungan secara menyeluruh dan rutin setiap periode, klasifikasi biaya berdasarkan empat kategori Hansen dan Mowen, pengakuan biaya melalui akun "Beban Lingkungan" tersendiri berbasis akrual, serta penyajian dan pengungkapan biaya lingkungan secara terpisah dan transparan dalam Laporan Operasional dan Catatan atas Laporan Keuangan, tanpa memerlukan perubahan besar pada sistem akuntansi yang telah berjalan. Rendahnya tingkat kesesuaian penerapan green accounting pada RSUD Batang Sangir dari sisi pencatatan akuntansi tidak mencerminkan rendahnya komitmen rumah sakit dalam pengelolaan lingkungan, melainkan disebabkan oleh belum tersedianya sistem akuntansi yang memadai untuk mengidentifikasi, mengklasifikasikan, dan melaporkan biaya lingkungan secara sistematis, serta belum terintegrasinya mekanisme pengajuan dan pertanggungjawaban biaya operasional lingkungan ke dalam Buku Kas Umum Ganti Uang secara tepat waktu. Sehubungan dengan hal tersebut, RSUD Batang Sangir disarankan untuk menambahkan akun khusus "Beban Lingkungan" pada bagan akun standar yang telah ada, menyusun laporan biaya lingkungan secara berkala berdasarkan klasifikasi Hansen dan Mowen, serta membangun mekanisme kas kecil atau prosedur penggantian biaya yang terintegrasi dengan Buku Kas Umum Ganti Uang bagi Instalasi Kesehatan Lingkungan. Penelitian selanjutnya disarankan untuk memperluas kajian pada periode yang lebih panjang guna

menelusuri kemungkinan munculnya biaya kegagalan eksternal, serta mempertimbangkan aspek sosial seperti tanggung jawab sosial perusahaan mengingat green accounting tidak hanya mencakup aspek lingkungan, tetapi juga aspek sosial dari suatu entitas.

DAFTAR PUSTAKA

Abdullah, M. W. (2022). Ragam isu dan konsep akuntansi lingkungan perspektif keislaman. Alauddin University Press.

Abdussamad, Z. (2021). Metode penelitian kualitatif. CV Syakir Media Press.

Aini, F. (2019). Pengelolaan sampah medis rumah sakit atau limbah B3 (bahan beracun dan berbahaya) di Sumatera Barat. Jurnal Education and Development, 7(1).

Alhamid, T., & Anufa, B. (2019). Instrumen pengumpulan data. STAIN Sorong: Ekonomi Islam.

Almunawwaroh, M., Marliyah, & Rahmayati. (2022). Green accounting: Akuntansi dan lingkungan. CV Media Sains Indonesia.

Azwar, A. (2020). Pengantar administrasi kesehatan (3rd ed.). Binarupa Aksara.

Chartier, Y. (2020). Safe management of wastes from health-care activities. World Health Organization.

Dura, J., & Riyanto, S. (2022). Application green accounting to sustainable development improve financial performance study in green industry. Jurnal Akuntansi, 26(2).

Guthrie, J. (2006). Legitimacy theory: A story of reporting social and environmental matters within the Australian food and beverage industry. The University of Sydney.

Heryana, A. (2018). Informan dan pemilihan informan dalam penelitian kualitatif. Universitas Esa Unggul.

Jauhari, I. (2024). Analisis penerapan green accounting dalam pengelolaan limbah. Jurnal Tera Ilmu Akuntansi, 25(2).

Karina, L. A. D., & Yuyetta, E. N. A. (2013). Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi pengungkapan CSR. Jurnal Akuntansi, 2(2).

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2019). Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2019 tentang Kesehatan Lingkungan Rumah Sakit.

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia. (2015). Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.56/Menlhk-Setjen/2015 tentang Tata Cara dan Persyaratan Teknis Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun dari Fasilitas Pelayanan Kesehatan.

Lako, A. (2018). Conceptual framework of green accounting.

Oktiara, K., & Effriyanti. (2024). Pengaruh green accounting, corporate social responsibility (CSR), dan struktur modal terhadap nilai perusahaan (Studi empiris pada perusahaan sektor energi di Bursa Efek Indonesia tahun 2018–2022). Journal of Management Accounting, 2(2).

Oktraviasni, N., Fitriyani, D., & Yolanda, Y. (2024). Analysis of the application of environmental accounting for waste management at the KH. Daud Rif Kul Tungkl. Jambi Accounting Review, 5(2).

Peraturan Pemerintah dan peraturan perundang-undangan: Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 18 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Limbah Medis Fasilitas Pelayanan Kesehatan Berbasis Wilayah.

Putri, A. H. (2018). Efektivitas pengelolaan limbah medis rumah sakit terhadap dampak lingkungan hidup. Jurnal Krtha Bhayangkara, 12(1).

Kriyantono, R. (2006). Teknik praktis riset komunikasi. Kencana Prenada Media Group.

Syamsuri, R., & Mus, S. F. (2020). Aktualisasi ajaran Islam dalam penerapan akuntansi lingkungan. Jurnal Akuntansi Multiparadigma, 11(3), 683–700.

Rizal, M., Yulianti, R., & Anwar, K. (2025). Penerapan green accounting pada perusahaan untuk mendukung keberlanjutan lingkungan. Jurnal Mahasiswa Manajemen dan Akuntansi, 4(1).

Rohim, A. S. M., & Hardiningsih, P. (2022). Implementasi green accounting Rumah Sakit Umum Daerah R.A. Kartini Jepara. Jurnal Ekonomi dan Bisnis, 17(1).

Rospani, T. W. J., & Handajani, L. (2024). Analisis penerapan green accounting pada RSUD Kota Mataram. Jurnal PETA, 9(2).

S.A., & Popa. (2013). Legitimacy theory. Springer-Verlag.

Schaltegger, S., & Burritt, R. (2020). Contemporary environmental accounting: Issues, concepts and practice. Routledge.

Titani, A. M., & Susilowati, E. (2022). Kepemilikan saham publik dan corporate social responsibility terhadap kinerja keuangan. Journal of Management and Business, 4(2).

Tjahjadi, B., Ardianto, F., & Prabowo, D. (2025). Sustainability perspektif bisnis dan akuntansi. Mitra Cendikia Media.

Wirartha, I. M. (2006). Metodologi penelitian sosial ekonomi. Andi Offset.